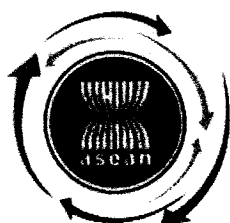


**PROSIDING**

**SIMPOSIUM NASIONAL VI  
ASOSIASI ILMUWAN ADMINISTRASI NEGARA  
(AsIAN) TAHUN 2016  
4-6 JULI 2016**

**PERAN ADMINISTRASI NEGARA/ PUBLIK  
DALAM PENINGKATAN DAYA SAING BANGSA  
UNTUK MENGHADAPI MEA**



**ASEAN  
Economic  
Community**



**Principal Organizer  
Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (AsIAN)  
Host  
Universitas Diponegoro Semarang  
Join Organizer  
Universitas Tidar Magelang  
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  
Universitas Sultan Fatah Demak**



**Kerjasama Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (AsIAN) Universitas Diponegoro Semarang,  
Universitas Tidar Magelang, Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang, dan  
Universitas Sultan Fatah Demak**



**PERAN ADMINISTRASI NEGARA/ PUBLIK  
DALAM PENINGKATAN DAYA SAING BANGSA  
UNTUK MENGHADAPI MEA**

**PROSIDING  
SIMPOSIUM NASIONAL VI  
ASOSIASI ILMUWAN ADMINISTRASI NEGARA (AsIAN) TAHUN 2016  
4-6 Juli 2016**

Kerjasama Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (AsIAN), Universitas Diponegoro Semarang,  
Universitas Tidar Magelang, Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang, dan Universitas Sultan  
Fatah Demak

Principal Organizer  
Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (AsIAN)  
Host  
Universitas Diponegoro Semarang  
Join Organizer  
Universitas Tidar Magelang  
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  
Universitas Sultan Fatah Demak

ISBN 978-602-6938-32-9

## KATA PENGANTAR

Simposium Nasional ke-6 Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara sekarang mengambil tema “Peran Admisitrasi Publik / Negara dalam Meningkatkan Daya Saing Bangsa di Era MEA”. Pada tahun 2016 suka tidak suka dan siap tidak siap Indonesia harus melaksanakan MEA karena hal ini merupakan kebijakan ASEAN yang harus dilaksanakan oleh semua anggotanya. MEA mempunyai tujuan mulia yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi se kawasan melalui kerja sama bidang ekonomi sehingga tercipta pasar dan basis tunggal produksi dalam kawasan. Hal ini terkait dengan Visi ASEAN 2020 yang akan mewujudkan keksejahteraan anggota ASEAN melauai integrasi ekonomi negara-negara anggota dalam bentuk perdagangan bebas berbasis inovasi produk dan SDM profesional. Untuk mewujudkan tujuan ini, Indonesia, Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Brunai Darsuslam akan melakukan pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas; mengakui kualifikasi profesional; membuat kebijakan makro keuangan dan ekonomi; menyetujui pembiayaan perdagangan; meningkatkan infrastruktur; melakukan pengembangan pada transaksi elektronik lewat e-ASEAN; memperpadukan industri kawasan untuk dapat mempromosikan sumber daerah; dan meningkatkan peran sektor swasta untuk ikut membangun Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Sesuai dengan asas *good governance* MEA akan berhasil jika masyarakat sipil (*civil society*), badan-badan hukum swasta (*corporation*), dan negara (*state*) bersinergi. Akan tetapi, dari tiga kekuatan tersebut peran negara masih sengat besar mengingat negara mempunyai infra struktur yang paling lengkap dan kuat. Di sinilah peran administrasi negara publik/ negara menjadi signifikan. Administrasi negara/publik merupakan mesin birokrasi suatu negara dengan fungsi utama memberikan pelayanan kepada publik. Pelayanan kepada publik mempunyai korelasi sangat signifikan dengan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat akan terwujud jika Negara memberikan pelayanan publik terbaik. Dalam konteks MEA ini maka pelayanan publik yang dilaksanakan oleh administrasi publik/negara adalah penyusunan kebijakan yang pro rakyat, implementasi kebijakan yang efektif dan efisien, tata kelola pemerintahan baik yang demokratis, inovatif, dan efisien, dan pengembangan sumber daya manusia yang melahirkan tenaga kerja terampil dan profesional.

Sejalan dengan peran tersebut maka sub-sub tema dalam Simposium AsIAN VI adalah: 1) peningkatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi; 2) kebijakan publik untuk peningkatan daya saing bangsa; 3) peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik; 4) peran pemerintah daerah dalam meningkatkan daya saing bangsa. Para ilmuwan adminsitrasi negara/publik dari berbagai perguruan tinggi dan para praktisi dari berbagai lembaga mengkaji masalah-masalah sesuai dengan tema tersebut untuk mendapatkan jawaban secara ilmiah dan memberi saran akademis dan praktis. Hasil kajian ini merupakan sumbangan pemikiran para ilmuwan administrasi publik/negara kepada

pemerintah, badan-badan hukum swasta, dan masyarakat sebagai bahan pembuatan kebijakan, strategi, dan langkah konkrit untuk meningkatkan daya saing bangsa Indonesia.

Kepada para peserta dan penyumbang makalah kami sampaikan ucapan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih juga kepada peserta simposium tanpa makalah yang tentu ikut memberikan saran dan masukan kepada penyaji makalah. Kami memberikan penghargaan yang tinggi kepada Panitia Simposium dan semua pihak yang telah bekerja keras untuk dapat menyelesaikan Simnas VI ini.

Semarang, 6 Agustus 2016

Pengurus ASiAN,

Dr. Hardi Warsono

## DAFTAR ISI

### BAGIAN 1

#### KEBIJAKAN PUBLIK UNTUK DAYA SAING BANGSA

MENINJAU KEMBALI REGULASI DAN BIROKRATISASI PERIZINAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) Tri Ratnawati.....	1
PENERAPAN MANAJEMEN KOLABORATIF DALAM PENGELOLAAN EKOWISATA DI INDONESIA Badrudin Kurniawan.....	15
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) DI KOTA PEKANBARU Dr. Tuti Khairani Harahap, S.Sos, M.Si.....	31
INOVASI PELAYANAN PUBLIK UNTUK PENINGKATAN DAYA SAING BANGSA DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Slamet Rosyadi.....	45
INOVASI PELAYANAN E-HEALTH UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK MEWUJUDKAN SMART CITY Meirinawati dan Indah Prabawati.....	51
PEMERINTAHAN DAERAH MENUJU E-GOVERNMENT DAN TANTANGANNYA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Oleh Hendrarto.....	61
PERLAWANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI KABUPATEN BANYUWANGI DALAM MENYONGSONG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) Mahbub Junaidi, S.Sos, M.Si.....	81
INOVASI PELAYANAN PUBLIK UNTUK PENINGKATAN DAYA SAING BANGSA DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Slamet Rosyadi.....	91
KONTRIBUSI <i>ACADEMIC, BUSINESS, GOVERNMENT, COMMUNITY</i> (ABGC) DALAM MANAJEMEN SAMPAH DI TPA PIYUNGAN Ambar Teguh Sulistiyani.....	97
MERETAS ASA DALAM KEBIJAKAN SOSIAL BAGI LANJUT USIA TERLANTAR UNTUK MENGHADAPI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (STUDI KASUS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) Kurnia Nur Fitriana, M.PA, Marita Ahdiyana, M.Si & Yanuardi, M.Si.....	115

## **BAGIAN 2**

### **PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING BANGSA**

KEBIJAKAN DAYA SAING BANGSA : PERLAWANAN KETIDAKSETARAAN GENDER DALAM RANTAI DAGANG UNDANG LINTAS NEGARA DI KALIMANTAN UTARA Indra Kertati, M.Si.....	135
DILEMA KEBIJAKAN PANGAN DI INDONESIA; ANTARA KEPENTINGAN PUBLIK DAN BISNIS Dr. Bambang Istanto, M.Si.....	157
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA GUNA MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) Edoardus E. Maturbongs, Godefridus Samderubun.....	185
MERINTIS HARAPAN PADA SEKTOR AGRIBISNIS DI KABUPATEN FAKFAK, PROVINSI PAPUA BARAT Pandhu Yuanjaya.....	199
KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM EKSPOR IMPOR BARANG MENGHADAPI ASEAN FREE TREAK AREA (AFTA) (STUDI PELINDO KRUENG GEUKUEH) Nurhafni.....	215
KEBIJAKAN REVITALISASI PASAR TRADISIONAL PERCONTOHAN PANORAMA UNTUK PENGUATAN DAYA SAING DAERAH DI KOTA BENGKULU Sri Indarti, S.Sos, M.Si dan Emma Elyani, SH, MH.....	227
<b>BAGIAN 3</b>	
<b>PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK</b>	
HUBUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAN PEMERINTAH DESA (KASUS DI KABUPATEN KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA) Prof. Dr. Hanif Nurcholis, M.Si.....	237
STRATEGI PENINGKATAN PROFESIONALISME BIROKRASI MELALUI INTENSIFIKASI BATAS USIA PENSIUN APARATUR SIPIL NEGARA Argo Pambudi.....	251

IDENTIFIKASI LEGAL DRAFTING DALAM FORMULASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN 50 KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT	
✓ Dr. Afriva Khaidir, SH., M.Hum., MAPA.....	265
MEKANISME REKRUTMEN CALON KEPALA DAERAH OLEH PARTAI AMANAT NASIONAL PADA PEMILIHAN GUBERNUR TAHUN 2015 DI SUMATERA BARAT (ANALISIS TERHADAP URGENSI MEKANISME REKRUTMEN POLITIK DALAM MELAHIRKAN KEPALA DAERAH YANG BERDAYA SAING )	
✓ Adil Mubarak, S.IP, M.Si.....	287
PENGEMBANGAN PARIWISATA KOTA SEMARANG MENYONGSONG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN MELALUI PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT	
Tri Yuniningsih.....	307
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) SEBAGAI KONTROL PUBLIK DI KABUPATEN PROBOLINGGO	
Siti Marwiyah.....	323
MODEL KERJASAMA <i>TRIPLE TRACKS (PRO JOB, PRO POOR, PRO GROWTH)</i> SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA HUTAN.	
Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP .....	333
DANA DESA: KESIAPAN APARATUR DESA DAN POTENSI PENYELEWENGANNYA	
Galih W. Pradana, M.Si.....	347
<i>POLICY CHANGE</i> UNTUK MENENTUKAN MENU APLIKASI PADA E-SERVICE	
Galih Wibowo.....	359
ANALISIS KINERJA ORGANISASI DI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SEMARANG (STUDI KASUS PADA BIDANG SOSIAL PELAYANAN BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL TERHADAP PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL )	
Theodora Ratih Rachmawati, Dyah Hariani.....	371
ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL PERFORMANCE IN SOCIAL SERVICES, MANPOWER AND TRANSMIGRATION IN SEMARANG DISTRICT ( A CASE STUDY OF SOCIAL AFFAIRS AND SOCIAL SECURITY ASSISTANCE SERVICES AGAINST SOCIAL WELFARE PROBLEMS)	
Theodora Ratih Rachmawati, Dyah Hariani.....	387

ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL  
PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN  
KABUPATEN WONOGIRI

Bernanda Daniar, Hardi Warsono, Ida Hayu Dwimawanti.....401

**BAGIAN 4**

**PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK**

EFEKTIVITAS OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (ORI)  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

Novia Winda Sari, Hardi Warsono, Yuwanto.....411

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBUDIDAYA RUMPUT LAUT OLEH  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MAMUJU PROVINSI  
SULAWESI BARAT (STUDI KASUS PADA PEMBUDIDAYA RUMPUT LAUT  
DI KECAMATAN MAMUJU)

Fernandes Simangunsong, S.STP, S.AP, M.Si & Ahmad Jaiz .....425

**MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MARJINAL USAHA MIKRO KECIL  
DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA PAYAKUMBUH**

✓ Syamsir.....441

REFORMASI ADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK (STUDI PELAYANAN  
ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI JAWA TENGAH)

Sulistiyo Ardi Nugroho, Kismartini, Hartuti Purnaweni.....455

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI INOVASI  
PADA KABUPATEN MERAUKE

Yohanis Endes Teturan.....471

UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PENCATATAN NIKAH PADA KUA  
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK

Sri Wahyuningsih, Sundarso, Kismartini.....481

MEMBANGUN JARINGAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Munawar Noor.....491

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DATAGO SEBAGAI INOVASI  
PELAYANAN PUBLIK DI KOTA MAGELANG

Dra. Eny Boedi Orbawati, M.Si.....501

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK UNTUK IBU DAN ANAK DALAM  
ANALISIS SITUASI IBU DAN ANAK KABUPATEN PEMALANG

Aristoening Winarni, Harsoyo, Christine DW, dan Rahmad Purwanto.....515



# MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MARJINAL USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA PAYAKUMBUH

Oleh: Syamsir

Dosen Lektor Kepala (IVc) Prodi Ilmu Administrasi Negara (IAN) FIS Universitas Negeri Padang;  
Jl. Prof. Hamka, Air Tawar, Padang 25131; e-mail: syamsirsaili@yahoo.com; HP: 085263639233

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menemukan model baru dalam pemberdayaan masyarakat marjinal kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), terutama kelompok Mikro dan Kecil, di Kota Payakumbuh Sumatera Barat; mengidentifikasi berbagai kendala atau hambatan yang mungkin akan ditemukan bila seandainya model itu diterapkan; serta merumuskan berbagai upaya yang mungkin dapat dilakukan untuk mengatasi kendala (hambatan) yang mungkin akan ditemukan di kota Payakumbuh terkait dengan improvisasi penerapan model pemberdayaan masyarakat marjinal UMKM tersebut. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan). Hasil penelitian ini antara lain menunjukkan bahwa: 1) Pembinaan masyarakat marjinal UMKM di Kota Payakumbuh diasumsikan akan lebih maksimal bila dilakukan dengan model pembinaan kolaborasi antar berbagai unsur yang ada dalam masyarakat, yaitu dengan pelibatan tokoh masyarakat, pemerintah, pengusaha, dan LSM; 2) Kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam pembinaan masyarakat marjinal UMKM di Kota Payakumbuh selama ini antara lain kendala ekonomis dalam bentuk kekurangan modal, dan kendala sosial budaya, 3) Upaya dalam mengatasi berbagai hambatan pembinaan masyarakat marjinal UMKM di Kota Payakumbuh perlu dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik sosial budaya yang hidup di kalangan masyarakat setempat.

**Keyword:** Model pemberdayaan, masyarakat marjinal, kelompok UMKM

## A. Pendahuluan

Krisis moneter dan ekonomi yang terjadi dan era globalisasi yang bergulir di Indonesia selama lebih kurang dua puluh tahun terakhir ini telah banyak menimbulkan masalah dalam berbagai sektor kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Sulitnya mencari pekerjaan merupakan kenyataan yang banyak dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Pemecahan masalah paling sederhana yang muncul dari pemikiran sekelompok masyarakat kecil untuk bertahan hidup adalah dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dalam skala kecil atau menjajakan berbagai jenis barang dagangan, makanan, atau minuman dalam skala kecil. Kelompok masyarakat inilah yang sekarang lebih sering dikenal dengan sebutan kelompok Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan/atau Pedagang Kaki Lima (PKL).

Menurut Mulyanto (2007), krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan tingkat pendapatan masyarakat di Jawa Tengah menurun dan jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan meningkat. Krisis ekonomi juga menyebabkan menurunnya produktivitas perusahaan sehingga banyak terjadi pemutusan hubungan kerja yang mengakibatkan meningkatnya pengangguran. Guna menanggulangi semakin banyaknya pengangguran, pemberdayaan sektor informal khususnya Pedagang Kaki Lima (PKL) sangat diperlukan. Meskipun kasus yang diungkapkan oleh Mulyanto adalah mengenai kondisi di daerah Jawa Tengah, namun boleh jadi kasus dan kondisi yang sama juga terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kota Payakumbuh.

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan/atau pekerjaan sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian yang tidak dapat lepas dari aktifitas sektor informal. Bahkan di daerah-daerah perkotaan kelompok UMK dan/atau PKL ini memegang peranan yang cukup penting dalam pengembangan sektor ekonomi dan perdagangan daerah. Mereka menggunakan tenaga kerja secara maksimum tanpa memerlukan modal yang besar. Dinamika yang berkembang dalam sektor informal ini cukup banyak menghasilkan surplus yang kemudian diinvestasikan kembali dalam sektor ini. Pertumbuhan dan perkembangan sektor informal UMK, termasuk PKL ini, terjadi berdasarkan kekuatan sendiri.

Besarnya potensi yang terdapat di balik pertumbuhan sektor informal selama ini belum terprediksi dengan baik. Sementara permasalahan sektor informal itu sendiri berkembang seiring dengan kompleksitas migrasi dan urbanisasi yang kian meningkat dari hari ke hari. Namun di sisi lain, kelompok UMK, terutama pedagang kaki lima (PKL), di beberapa kota besar seringkali diidentikkan dengan masalah kemacetan arus lalu lintas, karena PKL pada umumnya memanfaatkan fasilitas umum, terutama trotoar, sebagai media berdagang. Kelompok ini pun kerap diusir dan dikejar petugas karena mempergunakan lahan bisnis tidak sesuai dengan tata ruang perkotaan. Padahal mereka termasuk kelompok penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar bagi negara ini. Pada tahun 2014, misalnya, jumlah UMKM di Indonesia ada sebanyak 57,89 juta unit, atau 99,99 persen dari total jumlah pelaku usaha nasional. UMKM memberikan kontribusi terhadap kesempatan kerja sebesar 96,99 persen, dan terhadap pembentukan PDB sebesar 60,34 persen pada tahun 2014 (BPS, 2014). Hal ini membuat pembersihan usaha kelompok ini, terutama PKL, di lokasi-lokasi strategis menjadi kontroversial dilihat dari kaca mata sosial dan ekonomi.

Akhir-akhir ini berbagai institusi, baik pemerintah maupun swasta mulai memberi perhatian bagi kelangsungan bisnis UMK, termasuk PKL. Mereka harus dihargai karena perjuangannya luar biasa. Tidak pernah menerima permodalan dari pemerintah maupun perbankan, akan tetapi bisa *survive*. Dalam kenyataannya kelompok itu sebenarnya justru mampu menciptakan lapangan kerja dan penyumbang retribusi bagi pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, Kementerian Koperasi telah menginstruksikan agar

kelompok UMK ini diarahkan dan dibina serta diberdayakan, karena dampaknya terhadap perekonomian daerah dan nasional sangat dahsyat (Dinas Koperasi dan PKM Sumatera Barat, 2009).

Di wilayah-wilayah tertentu kehidupan ekonomi para UMK ini meningkat drastis dan tingkat usaha mereka juga semakin pesat dengan semakin ramainya pedagang yang datang dan menjajakan barang dagangannya di berbagai kawasan baik pagi, siang, sore maupun malam hari. Kelompok UMK, terutama PKL, seringkali menjadi pilihan bagi para pendatang sehingga sektor ini mampu menyerap dan memberikan lapangan pekerjaan di tengah persaingan kehidupan ekonomi perkotaan. Ditinjau dari modal usaha yang dimiliki, UMK yang di satu sisi sering dipandang sebelah mata tetapi mereka mampu dan mempunyai jiwa wirausaha dan tingkat kemandirian yang tinggi. Namun demikian, ternyata keberadaan para UMK/PKL menjadi tidak nyaman manakala pemerintah kota sudah mulai menerapkan beberapa kebijakan yang menyangkut masalah tata kota dan keindahannya, sehingga keberadaan kelompok ini di berbagai kawasan perlu digusur ke tempat lain.

Selama ini, setiap pemerintah Kabupaten/Kota telah mengembangkan infrastruktur perekonomian. Namun dalam pengembangan infrastruktur perekonomian tersebut, seringkali masalah UMK kurang diperhatikan. Seperti praktek di beberapa kota besar di negara maju, saat ini jumlah UMK cukup besar dan memiliki potensi yang dapat menyediakan lapangan kerja dalam masyarakat. Oleh karena itu kebijakan pemerintah dalam mengatur dan menangani UMK/PKL hendaklah diposisikan sebagai komponen yang mengayomi dan melindungi. Namun dalam kenyataannya kelompok UMK, terutama PKL sering dipandang sebagai pembuat masalah (*trouble maker*) dan bukan sebagai bagian dari solusi untuk membantu Pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan mandiri. Mereka masih sering dituding sebagai kambing hitam dan penyebab terjadinya kesemrawutan lalu lintas atau penyebab pencemaran (kekotoran) lingkungan.

Sebenarnya kalau direnungkan secara lebih mendalam, peranan UMK sungguh sangat penting dan amat membantu masyarakat konsumen karena mereka dapat memperoleh barang konsumsi yang cukup berkualitas namun murah dan mudah didapatkan disamping mengurangi angka pengangguran yang semakin hari semakin meningkat di Indonesia. Oleh karena itu program pembinaan dan pemberdayaan UMK merupakan salah satu langkah yang sangat tepat untuk dilakukan. Selain itu, dalam memahami UMK yang merupakan bagian dari kelompok masyarakat miskin, sebaiknya kita bercermin pada kata-kata bijak yang pernah dikemukakan oleh Prof. Mohammad Yunus, salah seorang penerima hadiah nobel perdamaian 2006. Menurutnya "masyarakat miskin tidak akan membuat masalah, tapi kitalah para pembuat kebijakan dan perancang lembaga yang terus menerus menciptakan masalah untuk mereka. Kita akan mendapat manfaat yang sangat besar kalau kita mempercayai mereka, mengagumi perjuangan dan komitmen mereka untuk menciptakan kehidupan yang layak bagi mereka sendiri" (Dinas Koperasi dan PKM Sumatera Barat, 2009).

Berdasarkan pemikiran di atas maka dipandang perlu untuk dilakukan suatu penelitian yang akan mencoba menggali berbagai informasi, menemukan, dan mengidentifikasi pola pemberdayaan masyarakat kelompok usaha mikro dan kecil di Kota Payakumbuh. Penelitian ini mencoba mengungkapkan berbagai persoalan menyangkut bentuk upaya pemberdayaan masyarakat kelompok UMKM, terutama yang termasuk kategori *Usaha Mikro* dan *Kecil* (UMK), serta berbagai kendala dan peluang dalam proses pemberdayaan kelompok UMK ini di Kota Payakumbuh.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka dipandang perlu untuk melakukan suatu penelitian untuk menemukan dan mengidentifikasi pola pemberdayaan masyarakat kelompok usaha mikro dan kecil di Kota Payakumbuh. Skop penelitian ini

mencakup berbagai persoalan yang berkaitan dengan bentuk atau upaya pemberdayaan masyarakat kelompok UMKM, terutama yang termasuk kategori *Usaha Mikro dan Kecil* (UMK), serta berbagai kendala dan peluang dalam proses pemberdayaan kelompok UMK ini di Kota Payakumbuh. Oleh karena itu rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pola atau model pemberdayaan masyarakat kelompok Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kota Payakumbuh selama ini?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh pemerintah Kota Payakumbuh dalam pemberdayaan masyarakat kelompok UMK ini di Kota Payakumbuh?
3. Bagaimana model pemberdayaan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh terhadap kelompok masyarakat UMK.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan bagi pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di Kota Payakumbuh dan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan dan penerapan program pemberdayaan masyarakat miskin (marjinal), terutama kelompok UMK, untuk masa yang akan datang. Selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas Koperindag dan pihak-pihak terkait dalam penetapan program bantuan yang patut diberikan kepada para UMK agar mereka lebih termotivasi dan lebih berdaya untuk menjalani profesi mereka sebagai pengusaha UMK.

## **B. Tinjauan Kepustakaan**

### ***Konsep Pemberdayaan dan Pemberdayaan Masyarakat***

Menurut Edi Suharto (2010) konsep pemberdayaan merujuk kepada kemampuan seseorang yang ditujukan kepada kelompok rentan dan kelompok lemah sehingga mereka bisa memiliki kemampuan dan kekuatan dalam dua hal, yaitu: 1) memiliki kebebasan yang mencakup segala hal, yaitu bebas dalam mengemukakan pendapat, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, dan bebas dalam memperoleh kesehatan; 2) mendapatkan sumber-sumber produktif yang bisa meningkatkan pendapatan dalam memperoleh barang dan jasa yang diperlukan. Pemberdayaan merupakan sebuah proses dalam mencapai tujuan untuk memperkuat atau memberikan keberdayaan pada sebuah kelompok atau individu-individu yang tidak berdaya yang mengalami keterbelakangan dan kemiskinan. Dalam mewujudkan sebuah pemberdayaan harus merujuk kepada hasil dalam mencapai sebuah perubahan sosial yang lebih baik dari kondisi sebelumnya.

Sementara menurut Syarif Makmur (2008) pemberdayaan merujuk kepada dua kecenderungan, yaitu: 1) proses pemberdayaan yang berorientasi kepada proses dalam memberikan kekuatan dan kemampuan agar seseorang lebih menjadi berdaya, dan 2) pemberdayaan cenderung kepada pemberian motivasi atau dorongan kepada individu dalam menentukan hidupnya.

### ***Kendala dan Upaya dalam Pemberdayaan Masyarakat***

Kartasmita dalam Sumaryadi (2005) menjelaskan bahwa hal-hal yang sering menjadi kendala dalam pengembangan atau pelaksanaan kebijakan yang mendukung pemberdayaan masyarakat antara lain: 1) kurangnya pemahaman atau komitmen yang sungguh-sungguh; 2) hambatan kebijakan keuangan, 3) jangka waktu yang dibutuhkan bagi perubahan di tingkat yang lebih tinggi; 4) diversifikasi budaya, ekonomi, geografis, suku bangsa; 5) struktur, fungsi dan perilaku pelayanan umum.

- 1) *Kurangnya pemahaman atau komitmen yang sungguh-sungguh.*

Meskipun sebagian besar pemegang kendali, termasuk penyusun kebijakan, dapat mendukung dasar-dasar pemberdayaan masyarakat dan memiliki pemahaman yang umum tentang persyaratannya, namun pembuat keputusan dapat kembali ke pendekatan *top-down*. Hal ini bisa terjadi karena mereka kurang memahami bagaimana memberdayakan masyarakat, atau sudah memahami tetapi pada saat dimana terasa ada krisis dan/atau tekanan pemberdayaan sulit dilakukan.

#### 2) *Hambatan Kebijakan Keuangan*

Kekakuan sistem penganggaran proyek serta sistem pengawasan keuangan negara yang sangat kurang fleksibilitasnya dan lebih berfokus pada aspek administrasi dan pencapaian target fisik semata tanpa melihat proses yang terjadi juga sering menjadi kendala dalam pemberdayaan masyarakat. Selain itu, juga sering terjadi bahwa kelompok masyarakat kurang mengontrol penggunaan dana-dana pusat (DIP sektoral) dan dana transfer (seperti Inpres). Mungkin tidak cukup dukungan keuangan bagi pemberdayaan masyarakat dari sumber-sumber daya lokal, baik disebabkan oleh rendahnya tingkat pemungutan pajak, rendahnya tingkat pengendalian 'dana hibah' dari pusat atau rendahnya tingkat komitmen pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumberdaya pemerintah setempat bagi usaha pemberdayaan masyarakat.

#### 3) *Jangka waktu yang dibutuhkan bagi perubahan di tingkat yang lebih tinggi.*

Ada kecenderungan dari program-program pemberdayaan masyarakat untuk melupakan perubahan-perubahan di tingkat lokal yang jauh lebih mudah diperkenalkan, dan bahwa resistensi (penolakan) di tingkat yang lebih tinggi akan lebih besar sampai tingkat pemahaman dan komitmen yang tulus untuk berubah dapat diperkenalkan kepada penyusun kebijakan.

#### 4) *Diversifikasi budaya, ekonomi, geografis, suku bangsa*

Ada keprihatinan bahwa kebijakan yang dikembangkan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat tidak akan cukup fleksibel untuk mengakomodasi kondisi geografis, tingkat ekonomi dan budaya yang berbeda-beda. Harus diperhatikan bahwa kebijakan yang memungkinkan, tetapi tidak menghalangi proses adaptasi yang dibutuhkan untuk memastikan strategi pemberdayaan masyarakat yang tepat dan diteruskan di tingkat lokal.

#### 5) *Struktur, Fungsi dan Perilaku Pelayanan Umum*

Sistem perencanaan dan kepemimpinan pembangunan yang terpusat selama tiga puluh dua tahun pemerintahan Orde Baru telah melahirkan tenaga pelayanan umum tingkat lapangan yang terbiasa mengikuti instruksi dari pusat. Akibatnya mereka tidak terlatih untuk mengembangkan, melaksanakan, mengevaluasi serta merubah suatu proyek di tingkat daerah. Inovasi dan pengambilan keputusan oleh staf tingkat lapangan tidak pernah dihargai; sehingga mereka mengalami kesulitan berperan sebagai fasilitator dalam kelompok masyarakat, yang kemudian mempromosikan dan mempertahankan kegiatan-kegiatan yang dihasilkan.

Selanjutnya Kartasasmita (dalam Sumaryadi, 2005) mengemukakan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui tiga fase, yaitu:

- 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang; kondisi ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan.
- 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan sarana dan fasilitas yang dapat diakses oleh lapisan masyarakat yang paling bawah.

- 3) Memberdayakan masyarakat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah; dalam proses pemberdayaan masyarakat harus dicegah jangan sampai lemah, bertambah lemah, atau makin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa proses pemberdayaan masyarakat harus melindungi masyarakat yang lemah, agar yang lemah jangan tertindas oleh orang yang kuat atau terpinggirkan oleh yang kuat. Oleh sebab itu pemihakan/perlindungan terhadap yang lemah amat penting dalam proses pemberdayaan masyarakat.

Dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 66 Tahun 2005 Tentang Pedoman Umum Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat di Nagari dikemukakan bahwa strategi yang digunakan dalam rangka peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat meliputi:

- 1) Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan berbagai sektor yang berfungsi memberdayakan masyarakat.
- 2) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, kemandirian, dan kepedulian masyarakat dalam pembangunan dan mengutamakan peran aktif masyarakat.
- 3) Meningkatkan peran wirausaha sebagai pelaku ekonomi dan menggerakkan roda perekonomian.
- 4) Mendorong pengusaha skala menengah dan besar untuk membantu wirausaha kecil atau ekonomi mikro dalam bidang produksi, pengolahan dan pemasaran hasil melalui berbagai pola yang sesuai.
- 5) Mengembangkan kapasitas organisasi masyarakat lokal untuk mempercepat proses modernisasi di bidang ekonomi, teknologi, pelestarian budaya Minangkabau dan budaya lain. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta solidaritas sosial masyarakat setempat.
- 6) Menumbuh kembangkan usaha-usaha masyarakat yang sudah ada agar mampu bersaing dalam era globalisasi saat ini.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa strategi yang dapat dilakukan dalam melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk memandirikan masyarakat serta meningkatkan kesadaran untuk maju dan berkembang sehingga dapat terlibat dalam pembangunan, dan agar mereka dapat bersaing dengan perkembangan masa.

#### ***Kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Pedagang Kaki Lima (PKL)***

Kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sebuah konsep yang merujuk kepada kelompok orang (pengusaha) yang memiliki aset dan omset dalam skala kecil, mikro, dan menengah. UMKM di Indonesia telah diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Dalam undang-undang ini antara lain dijelaskan bahwa *Usaha Mikro* adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Sedangkan *Usaha Kecil* adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Sementara *Usaha Menengah* adalah usaha ekonomi produktif

yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Selanjutnya, Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah bagian dari kelompok UMKM. PKL sering diartikan sebagai orang atau kelompok orang yang melakukan usaha dagang dan atau jasa di tempat umum, baik menggunakan atau tidak menggunakan sesuatu, dalam melaksanakan kegiatan usaha dagang. Tempat usaha PKL adalah tempat umum, yaitu tepi-tepi jalan umum, trotoar, dan lapangan serta tempat lain di atas tanah yang bukan miliknya atau di atas tanah milik negara yang ditetapkan oleh pemerintah kota. Dengan kata lain PKL adalah perorangan yang melakukan penjualan barang-barang dengan menggunakan bagian jalan atau trotoar dan tempat-tempat untuk kepentingan umum serta tempat lain yang bukan miliknya. Sementara definisi lain menjelaskan bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan informal dengan menggunakan lahan terbuka atau tertutup, sebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak atau peralatan bongkar pasang sesuai waktu yang telah ditentukan.

PKL pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu 1) PKL yang *mobile*, yaitu PKL yang berdagang secara tidak menetap; 2) PKL yang tidak *mobile* yaitu PKL yang berdagang secara menetap; dan 3) PKL *static knock down*, yaitu PKL yang menggelar barang dagangannya pada waktu dan tempat tertentu. (Amidi dalam Mulyanto, 2007). Pengalaman negara-negara berkembang di dunia menunjukkan bahwa pada umumnya Pedagang Kaki Lima (PKL) terdiri dari para migran (Manning dan Effendi, 1985). Kecenderungan tersebut juga dapat dilihat pada PKL yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, implikasi dari kecenderungan tersebut adalah terjadinya hubungan kuat antara pedagang kaki lima dan migrasi. Dengan demikian, selagi terjadi kesenjangan sosial-ekonomi antara desa dan kota, maka selama itu pula akan terus terjadi arus migrasi desa-kota (urbanisasi) yang merupakan sumber muka-muka baru bagi PKL.

Keterbatasan pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh para pendatang menyebabkan mereka lebih memilih pada jenis kegiatan usaha yang tidak terlalu menuntut pendidikan dan keterampilan yang tinggi. Pilihan mereka jatuh pada sektor informal yaitu pedagang kaki lima (PKL) atau sebagai pedagang asongan. Dalam pandangan Rachbini (dalam Alisjahbana, 2006), para PKL yang menjajakan barang dagangannya di berbagai sudut kota sesungguhnya adalah kelompok masyarakat yang tergolong marjinal dan tidak berdaya. Dikatakan marjinal sebab mereka rata-rata tersisih dari arus kehidupan kota dan bahkan ditelakung oleh kemajuan kota itu sendiri. Dikatakan tidak berdaya, karena mereka biasanya tidak terjangkau dan tidak terlindungi oleh hukum, posisi tawar (*bargaining position*) mereka lemah dan acapkali menjadi obyek penertiban dan penataan kota yang tak jarang bersikap represif.

Pedagang kaki lima pada umumnya adalah *self-employed*, artinya mayoritas PKL terdiri dari satu tenaga kerja. Modal yang dimiliki relatif kecil, dan terbagi atas modal tetap, berupa peralatan, dan modal kerja. Dana tersebut jarang sekali dipenuhi dari lembaga keuangan resmi. Biasanya PKL mendapatkan dana atau pinjaman dari lembaga atau perorangan yang tidak resmi, atau bersumber dari *supplier* yang memasok barang dagangan kepada PKL. Sedangkan sumber dana yang berasal dari tabungan sendiri sangat sedikit. Ini berarti hanya sedikit dari mereka yang dapat menyisihkan hasil usahanya. Ini mudah dipahami karena rendahnya tingkat keuntungan PKL dan cara pengelolaan uangnya pun sangat sederhana. Sehingga kemungkinan untuk mengadakan investasi modal

maupun ekspansi usaha sangat kecil. Juga perlu ditambahkan bahwa secara umum PKL ini termasuk dalam kategori yang mayoritas berada dalam usia kerja utama (*prime-age*).

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat kelompok Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang terdapat atau berada di Kota Payakumbuh. Berdasarkan populasi penelitian dan sesuai pula dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka penentuan sampel dalam kajian ini, terutama untuk pengumpulan data kuantitatif, dilakukan dengan dua tahap. Pada tahap pertama digunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan daerah (kawasan) serta kelompok sampel UMK yang dengan pertimbangan tertentu dipandang layak dijadikan kawasan atau kelompok sampel. Pada tahap kedua digunakan teknik *proportional random sampling* untuk menentukan kelompok UMK yang berasal dari berbagai latar belakang umur jenis kelamin, status perkawinan, lama berusaha, jenis usaha, dan karakteristik demografi lainnya secara proporsional. Disamping itu, untuk menghindari bias dalam pengambilan kesimpulan penelitian, dilakukan wawancara secara mendalam dengan beberapa informan yang ditentukan secara *purposive*, antara lain para pimpinan organisasi UMK, Pimpinan Koperasi Pembina UMK, pihak Pemko, dan para informan lainnya yang dipandang berkompeten untuk memberikan informasi penelitian ini.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui angket dan format pedoman wawancara. Pengolahan (analisis) data kuantitatif dalam penelitian ini dilakukan melalui proses analisis data kuantitatif sederhana dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dalam bentuk frekuensi dan persentase. Hasil analisis ini dilanjutkan dengan pemberian interpretasi data statistik dan seterusnya dilakukan penyimpulan hasil analisis. Sedangkan analisis data kualitatif dalam penelitian ini dilakukan secara terus menerus sepanjang penelitian, dari awal sampai akhir, secara sirkuler. Analisis data kualitatif dilakukan dengan menggunakan teknik *interactive model of analysis* melalui tahap reduksi data, display data, tafsiran data, dan pengambilan kesimpulan.

### D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian tahun I dari 3 seri penelitian ini antara lain menemukan bahwa usaha dan keberadaan PKL di Kota Payakumbuh telah terlindungi dan terfasilitasi oleh beberapa peraturan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012, Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor: 26 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 09 Tahun 2010, dan beberapa Keputusan Gubernur dari tahun 2008 - 2013). Namun dalam praktiknya pembinaan PKL seperti yang dicanangkan dalam Perda dan Perwako Kota Payakumbuh tersebut masih kurang maksimal, setidaknya-tidaknya dalam beberapa aspek dari penerapan aturan-aturan tersebut, seperti dalam hal pelatihan dan pemberdayaan PKL. Dengan demikian melalui penelitian tahun ke-2 diungkapkan dan dikaji: 1) Bagaimana upaya improvisasi model dan penerapannya dalam pembinaan PKL di Kota Payakumbuh?; 2) Apakah kendala atau hambatan yang ditemukan bila seandainya kemungkinan model/metode itu diterapkan?; dan 3) Apakah upaya yang mungkin dapat dilakukan untuk mengatasi kendala atau hambatan yang mungkin akan ditemukan tersebut?

Secara umum dan ringkas hasil penelitian tahun ke-2 ini dapat dikemukakan sebagai berikut.

#### 1. Model pembinaan masyarakat marjinal di Kota Payakumbuh



Pembinaan masyarakat marjinal (terutama kelompok UMK) di Kota Payakumbuh diasumsikan akan lebih maksimal bila dilakukan dengan model pembinaan kolaborasi antar berbagai unsur yang ada dalam masyarakat, yaitu dengan pelibatan tokoh masyarakat, pemerintah, pengusaha, dan LSM. Kerjasama antar berbagai pihak ini sangat penting dilakukan agar pembinaan kelompok UMKM, terutama kelompok UMK, di Kota Payakumbuh lebih dapat mencapai sasaran yang diinginkan dalam pemberdayaan masyarakat marjinal yang bersangkutan. Keterlibatan para tokoh masyarakat, pemerintah, pengusaha, dan LSM sangat diperlukan dalam pembinaan atau pemberdayaan kelompok UMK ini terutama dalam kaitannya dengan pemberantasan para tengkulak dan “lintah darat” yang masih saja menghantui dan menghambat perkembangan usaha UMK di Kota Payakumbuh ini.

Selain itu keterlibatan para pihak ini juga sangat diperlukan dalam rangka pelaksanaan program relokasi PKL dan UMK agar pengembangan usaha mereka dapat lebih tertata dan terhindar dari konflik, terutama konflik antara para PKL dan pihak pelaksana relokasi (penertiban PKL) yang seringkali terjadi pada setiap kali akan dilakukannya relokasi PKL, termasuk di Kota Payakumbuh. Keterlibatan para pihak ini juga diperlukan dalam pengaturan dan penyaluran berbagai program yang berkaitan dengan bantuan pergerakan modal bagi para UMK. Demikian juga dalam hal pengaturan pedagang (PKL) malam melalui peraturan daerah (Perda 9/2010) yang tidak jarang pula menimbulkan kesalahpahaman antara pihak pelaksana perda (pemda) dan para PKL, seperti dalam hal pengaturan tempat berdagang, pungutan retribusi, persoalan keamanan, dan lain-lain.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan, baik dari pihak pengelola koperasi PKL, pihak instansi pemerintahan terkait, dan beberapa PKL di Kota Payakumbuh maka didapatkan gambaran bahwa model pembinaan PKL yang selama ini diterapkan di Kota Payakumbuh pada dasarnya melibatkan (menyangkut) beberapa aspek yang saling terkait dan mendukung satu sama lain, yaitu: 1) Aspek Regulasi/Hukum, 2) Aspek Sumber Daya Manusia, 3) Aspek Permodalan, dan 4) Aspek Manajemen. Secara lebih detail model pembinaan masyarakat marjinal/UMK di Kota Payakumbuh tersebut dapat digambarkan dalam bagan atau gambar 1.

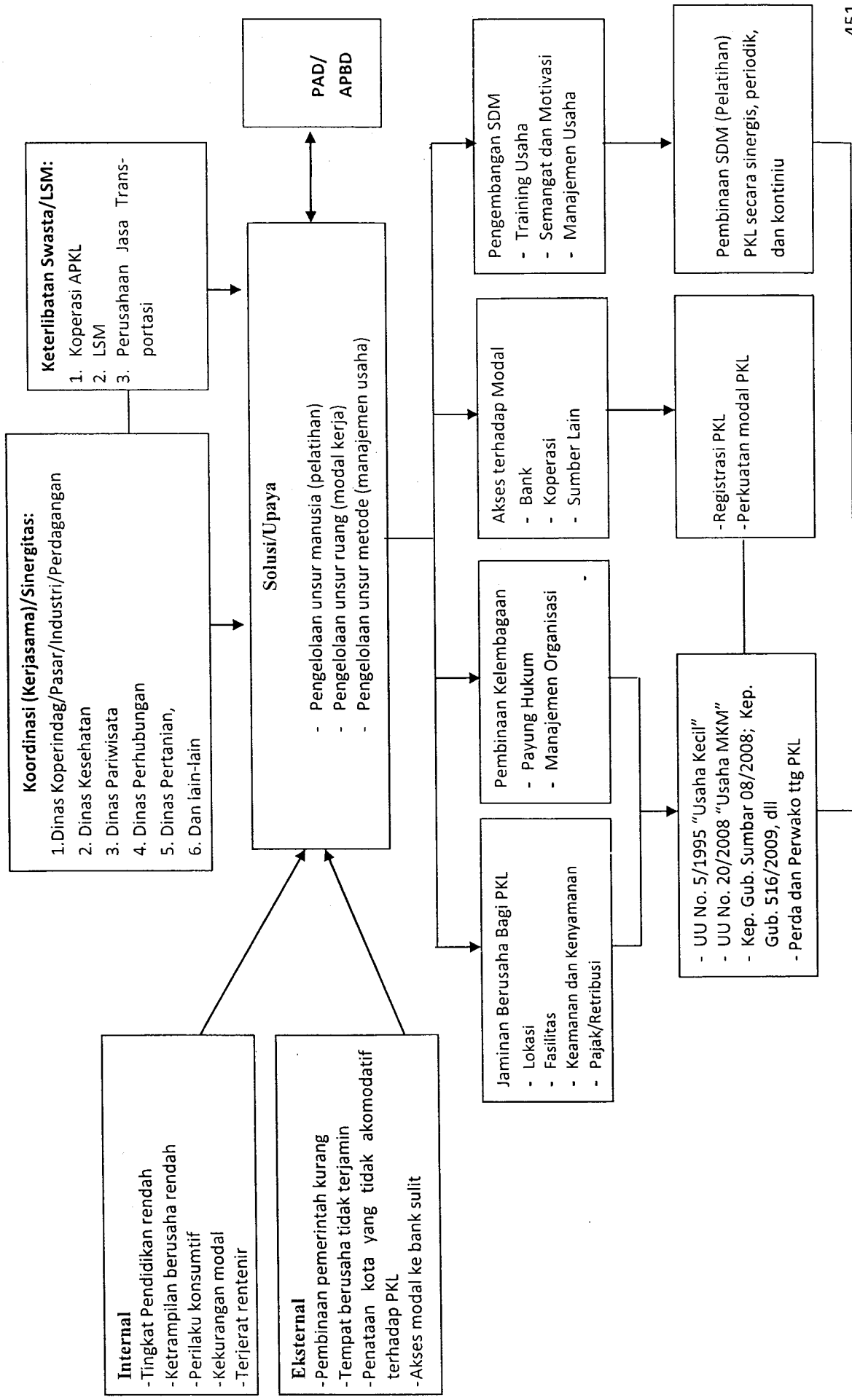
## *2. Kendala dalam pembinaan masyarakat marjinal UMKM di Kota Payakumbuh*

Kendala-kendala yang seringkali dihadapi dalam pembinaan masyarakat marjinal UMKM di Kota Payakumbuh selama ini antara lain berkisar seputar kendala atau persoalan klasik, yaitu kendala ekonomis dalam bentuk kekurangan modal dan kendala sosial budaya. Kendala ekonomis antara lain dalam hal kekurangan modal untuk pengembangan usaha kelompok UMK ini, sehingga upaya terakhir yang harus mereka lakukan adalah dengan cara meminjam uang dari para “rentenir” yang sudah barang tentu dan seringkali sangat merugikan serta menghambat pengembangan usaha mereka secara maksimal. Sementara kendala sosial budaya dalam pembinaan UMK ini antara lain adalah pengelolaan usaha yang cenderung melibatkan banyak orang/anggota keluarga dan karib kerabat dalam manajemen usaha mereka. Dari satu sisi pengembangan usaha dengan manajemen seperti ini memang memberikan keuntungan karena adanya usaha bersama dalam pengembangan usaha. Akan tetapi dari sisi lain manajemen kolaborasi seperti ini juga agak menyulitkan pengembangan usaha dan tidak jarang menimbulkan konflik internal atau “pecah kongsi” di antara mereka, sehingga pada akhirnya pengembangan usaha menjadi terganggu.

Kendala lain dalam pembinaan masyarakat marjinal di Kota Payakumbuh ini adalah dalam kaitannya dengan realisasi program pemerintah yang kurang maksimal, seperti dalam pengadaan pelatihan bagi para UMK. Ada kesan bahwa pembinaan PKL seperti yang dicanangkan dalam Perda dan Perwako Kota Payakumbuh tersebut kurang sesuai dengan praktik di lapangan, setidaknya-tidaknya dalam beberapa aspek dari penerapan

aturan-aturan tersebut. Dalam hal pelatihan, misalnya, meskipun informan dari pihak dinas koperindag (koperasi UMKM) dan informan dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKL) sebagai pembina PKL di Kota Payakumbuh menginformasikan bahwa pelatihan PKL ada dilaksanakan namun menurut informan dari beberapa PKL pelatihan tersebut berjalan kurang maksimal. Kurang maksimalnya pelatihan ini antara lain karena *setting* waktu (jadual) pelatihan yang kurang tepat. Bagi PKL waktu adalah

**Gambar 1. Model Pembinaan Masyarakat Marjinal di Kota Payakumbuh**



sangat berharga bagi mereka untuk mencari rezki. Bila waktu pelatihan ditetapkan pada saat-saat mereka harus berdagang, tentu saja hal ini akan menjadi kendala dalam pelaksanaan pelatihan. Pelatihan-pelatihan yang pernah diadakan antara lain pelatihan tentang manajemen usaha, teknik pemasaran, cara menjaga higienis gizi makanan, dan lain-lain. Namun dalam realisasinya tidak banyak para PKL yang merasakan hasil dari pelatihan ini. Bahkan sebagian dari PKL menginformasikan bahwa pelatihan tersebut hanya “pura-pura” saja dan tidak banyak gunanya bagi mereka.

### 3. Upaya dalam mengatasi berbagai hambatan pembinaan masyarakat marjinal UMKM di Kota Payakumbuh

Untuk mengatasi hambatan dalam pembinaan masyarakat marjinal UMKM di Kota Payakumbuh pihak pemerintah daerah tampaknya perlu mempertimbangkan karakteristik sosial budaya yang hidup dan berkembang di kalangan masyarakat setempat. Model atau upaya pemberdayaan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh terhadap kelompok masyarakat UMK antara lain dengan cara melibatkan berbagai pihak, seperti pihak LSM, tokoh masyarakat, pihak swasta (seperti pengelola transportasi, pembangunan penginapan syariah, merealisasikan berbagai program pelatihan yang selama ini terkesan fiktif dan tidak dikelola dengan serius, merangkul provokator atau “biang kerok” yang kadang-kadang menjadi penghambat pembinaan para PKL, menertibkan pihak-pihak yang seringkali menjadi “penanggung di air keruh” dalam pembinaan para PKL, merealisasi program bantuan secara lebih adil dan transparan bagi para PKL/UMK, mengintensifkan asosiasi (koperasi) PKL dalam pemberdayaan PKL, dan lain sebagainya.

Bambang Wahyu Sudarmadji dan Sri Lestari Munajati (2005) berdasarkan penelitiannya di Kawasan PKL di Kota Bogor pernah memberikan beberapa alternatif dalam penanganan atau pembinaan PKL di Kota Bogor berdasarkan pengelompokan kawasan PKL. Beberapa indikasi program penanganan dari setiap kelompok kawasan PKL tersebut yaitu:

1. Program *pembinaan* PKL, terdiri dari: a) Pembentukan Koperasi yang anggotanya para PKL; b) Penambahan Modal usaha; c) Pemberian insentif retribusi; d) Penyerasian lapak, dan e) Penyediaan bantuan sarana usaha.
2. Program *penataan* PKL, berupa kegiatan: a) Pembatasan jam operasi; b) Pembatasan kawasan usaha; c) Pembatasan luas usaha; dan d) Pengenaan disinsentif retribusi maupun pajak bagi kawasan yang telah mengarah kepada penciptaan gangguan lalu-lintas, estetika dan sebagainya.
3. Program *penertiban* PKL, berupa: a) Pemindahan tempat usaha bagi pedagang yang mengganggu lalu-lintas; b) Pengenaan disinsentif retribusi atau pajak untuk mencegah pengembangan; c) Penutupan usaha bagi yang nyata-nyata mengganggu.

Halomoan Tamba dan Saudin Sijabat (2006) yang meneliti tentang PKL sebagai *entrepreneur* yang terabaikan juga memberikan beberapa tawaran tentang pemberdayaan dan pembinaan PKL, antara lain pemberdayaan PKL melalui koperasi dan melalui kemitraan pemerintah dan swasta. Menurut mereka PKL pada umumnya adalah *self-employed*, artinya mayoritas PKL terdiri dari satu tenaga kerja. Modal yang dimiliki relatif kecil, dan terbagi atas modal tetap, berupa peralatan, dan modal kerja. Dana tersebut jarang sekali dipenuhi dari lembaga keuangan resmi. Biasanya PKL mendapatkan dana atau pinjaman dari lembaga atau perorangan yang tidak resmi. Atau bersumber dari supplier yang memasok barang dagangan

kepada PKL. Sedangkan sumber dana yang berasal dari tabungan sendiri sangat sedikit. Ini berarti hanya sedikit dari mereka yang dapat menyisihkan hasil usahanya. Ini mudah dipahami karena rendahnya tingkat keuntungan PKL dan cara pengelolaan uangnyapun sangat sederhana. Sehingga kemungkinan untuk mengadakan investasi modal maupun ekspansi usaha sangat kecil. Oleh karena itu peranan koperasi akan sangat membantu para PKL.

Dalam pemberdayaan PKL, masing-masing pemerintah kabupaten/kota mempunyai kebijakan yang berbeda satu sama lain. Misalnya pemerintah daerah Kotamadya Yogyakarta menyerahkan sepenuhnya pengelolaan PKL yang di Malioboro kepada PKL itu sendiri. Hal tersebut menunjukkan pelaksanaan usahanya PKL menggunakan konsep 'dari PKL, oleh PKL, dan untuk PKL' yang tampak dalam pembentukan organisasi PKL yang bersifat *bottom up* untuk mengorganisir PKL di Kawasan Malioboro. Keberadaan organisasi pedagang kaki lima sangat diperlukan di Kawasan Malioboro mengingat luasnya areal usaha dan banyaknya pedagang yang mencari penghidupan di kawasan tersebut. Selain itu, organisasi tersebut sekaligus dilibatkan untuk ikut menciptakan ketertiban dan keamanan di Kawasan Malioboro.

Contoh lain, model pemberdayaan PKL yang dilakukan oleh Pemerintah Surakarta dalam tahun 2006 yang bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Upaya pemberdayaan PKL dilakukan dengan pendekatan pengembangan sarana usaha yang diiringi dengan upaya transformasi sektor informal menjadi sektor formal. Upaya transformasi tersebut tentunya melibatkan upaya pemberdayaan pelaku sektor informal untuk mengembangkan kapasitas usahanya. Pemberdayaan tersebut, di sisi lain juga diiringi oleh kemudahan prosedur formalisasi kegiatan usaha oleh Pemerintah Daerah setempat. Kemudian model pemberdayaan PKL yang diperagakan oleh pemerintah DKI Jakarta juga salah satu contoh yang memiliki keunikan tersendiri. Pola PKL Blok S, dimana Pemerintah DKI Jakarta memodernisasi lokasi, sarana usaha, dan mempromosikannya ke masyarakat membuat sentra PKL tersebut menjadi lokasi yang lebih elite. Pola lainnya juga ada yang disebut "Lokbin" alias lokasi binaan. Para PKL dihimpun dalam suatu lokasi tertentu dan dengan demikian mereka memiliki kepastian lokasi berusaha (Halomoan Tamba dan Saudin Sijabat, 2006).

Beberapa tawaran atau alternatif ini sepertinya juga perlu dipertimbangkan dalam penanganan atau pembinaan para UMK di Kota Payakumbuh. Tapi tentu saja dengan berbagai pertimbangan dan penyesuaian dengan karakteristik sosial budaya di kota ini. Penyesuaian-penyesuaian tersebut antara lain dalam hal pengembangan usaha PKL yang bagi orang Minang cenderung dilakukan dalam bentuk usaha keluarga dan pelibatan banyak orang (anggota karib kerabat) dalam manajemen atau pengembangan usaha mereka. Hal ini tentu saja memerlukan pengangan, pengelolaan atau manajemen tersendiri dalam pembinaan para UMK dan atau PKL di Kota Payakumbuh ini pada khususnya.

## E. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian ini dan analisis yang dilakukan serta bercermin kepada berbagai hasil penelitian lain oleh beberapa peneliti di berbagai daerah, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan, antara lain bahwa:

1. Pembinaan masyarakat marjinal UMKM di Kota Payakumbuh diasumsikan akan lebih maksimal bila dilakukan dengan model pembinaan kolaborasi antar berbagai unsur yang ada dalam masyarakat, yaitu dengan pelibatan tokoh masyarakat, pemerintah, pengusaha, dan LSM;

2. Kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam pembinaan masyarakat marjinal UMKM di Kota Payakumbuh selama ini antara lain kendala ekonomis dalam bentuk kekurangan modal, dan kendala sosial budaya; dan
3. Upaya dalam mengatasi berbagai hambatan pembinaan masyarakat marjinal UMKM di Kota Payakumbuh perlu dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik sosial budaya yang hidup di kalangan masyarakat setempat.

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Alisjahbana, 2006: *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*. Surabaya: ITS Press.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2014. "Produk Domestik Bruto". (online), (<http://www.bps.go.id/index.php?news=730>, diakses 12 Juni 2016)
- Bambang Wahyu Sudarmadji dan Sri Lestari Munajati. 2005. "Klasifikasi dan Kajian Spasial Kawasan Pedagang Kaki Lima di Kota Bogor". dalam *Jurnal Ilmiah Geomatika* Vol.11 No.2, Des 2005.
- Dinas Koperasi dan PKM Sumatera Barat. 2009. *Forum Koperasi*. Edisi. Juli, 2009 .
- Halomoan Tamba dan Saudin Sijabat. 2006. "Pedagang Kaki Lima: Entrepreneur Yang Terabaikan" dalam *Infokop* Nomor 29 Tahun XXII, 2006
- Manning, Chris, dan Tajuddin Noer Effendi (Penyunting). 1985. *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*. Yayasan Obor Indonesia dan Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan UGM. Jakarta: PT. Gramedia.
- Mulyanto. 2007. "Pengaruh Motivasi dan Kemampuan Manajerial terhadap Kinerja Usaha Pedagang Kaki Lima Menetap (Suatu Survei pada Pusat Perdagangan dan Wisata di Kota Surakarta)" dalam *Jurnal BENEFIT*, Vol. 11, No. 1, Juni 2007.
- Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: PT. Reflika Aditama.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama
- Syarif, Makmur. 2008. *Pemberdayaan sumber daya manusia dan efektifitas organisasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 66 Tahun 2005 Tentang *Pedoman Umum Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat di Nagari*.